



INOVASI PEMBIAYAAN ORGANISASI INTERNASIONAL: *GREEN FINANCE*, *BLENDED FINANCE*, DAN MASA DEPAN TATA KELOLA GLOBAL

**Bararela Sebastian Untung, Yanuar Tri Pamungkas, Raka Wahyu Ananda,
Helen Intania Surayda, Wafda Vivid Izziyana**

Fakultas Hukum, Universitas Semarang

sebastianbara1020@gmail.com, yanuar.tri@gmail.com, A111220201@student.usm.ac.id,
helen.intania@usm.ac.id, wafda@usm.ac.id

ABSTRACT

Traditional funding structures of international organizations are increasingly seen as inadequate to address global challenges such as climate change, humanitarian crises, and long-term sustainable development agendas. This paper's central question is how green finance and blended finance can serve as innovative financing models capable of strengthening the financial capacity of international organizations within contemporary global governance. The study positions itself as a normative-analytical inquiry that evaluates the effectiveness of these two mechanisms in overcoming the limitations of assessed and voluntary contributions that have long dominated multilateral financing. The discussion proceeds through conceptual and comparative analysis of policy documents, institutional reports, and relevant academic literature. The research employs a library research approach combined with content analysis to identify the characteristics, opportunities, and challenges inherent in implementing green finance and blended finance within multilateral operations. The findings indicate that both mechanisms significantly expand the funding base, enhance private-sector participation, and improve the fiscal resilience of international organizations. Nevertheless, their effectiveness depends heavily on transparency, accountability frameworks, and the ability of institutions to manage the risk of donor dominance. Overall, the study concludes that financial innovation constitutes a pivotal element for shaping a more adaptive, inclusive, and sustainable future of global governance.

Keywords: *Green finance, Blended finance, International Organizations*

ABSTRAK

Pendanaan tradisional organisasi internasional semakin dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana *green finance* dan *blended finance* dapat berfungsi sebagai inovasi pembiayaan yang memperkuat kapasitas organisasi internasional dalam tata kelola global. Penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian normatif-analitis yang mengevaluasi efektivitas dua mekanisme pendanaan tersebut dalam mengatasi keterbatasan kontribusi wajib dan sukarela yang selama ini mendominasi struktur pembiayaan organisasi internasional. Pembahasan dilakukan melalui analisis konseptual dan komparatif terhadap dokumen kebijakan, laporan lembaga



internasional, serta literatur akademik yang relevan. Metode yang digunakan adalah library research dengan teknik content analysis untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi, dan tantangan *green finance* serta *blended finance* dalam praktik pembiayaan multilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut mampu memperluas basis pendanaan, meningkatkan partisipasi sektor swasta, dan memperkuat stabilitas fiskal organisasi internasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat transparansi, pengawasan, dan kemampuan organisasi internasional mencegah dominasi aktor donor. Dengan demikian, inovasi pembiayaan menjadi elemen kunci bagi masa depan tata kelola global yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Green finance*, *Blended finance*, Organisasi Internasional

PENDAHULUAN

Inovasi pembiayaan menjadi tema yang semakin penting dalam studi organisasi internasional, terutama ketika mekanisme pendanaan tradisional tidak lagi mampu menjawab kompleksitas tantangan global masa kini. Organisasi internasional menghadapi tekanan untuk tetap relevan di tengah krisis multilateralisme, perubahan iklim, dan instabilitas ekonomi global. Kondisi ini membuat kebutuhan pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak (Ahmad, 2025).

Ketergantungan organisasi internasional pada kontribusi wajib dan sukarela telah menciptakan ketidakpastian fiskal yang signifikan. Sifat donasi sukarela yang tidak stabil dan dipengaruhi kepentingan politik negara donor membuat banyak program global tidak dapat berjalan optimal. Kontribusi seperti ini sering kali bersifat earmarked sehingga membatasi ruang kebijakan lembaga internasional (Liu, 2024).

Di tengah tekanan tersebut, muncul mekanisme pembiayaan baru

seperti *green finance* dan *blended finance* yang mulai diadopsi oleh berbagai organisasi internasional. Kedua pendekatan ini diakui sebagai instrumen penting dalam arsitektur pembiayaan global modern, karena mampu menggabungkan kepentingan publik dan privat dalam satu kerangka keuangan yang lebih adaptif (Gafsi, 2024).

Green finance berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan yang besar untuk mengatasi perubahan iklim dan mengembangkan ekonomi hijau. Instrumen ini memfokuskan pendanaan pada proyek ramah lingkungan, energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon. Para ahli memandangnya sebagai bagian dari transformasi ekonomi global menuju pembangunan berkelanjutan (Stern, 2020).

Organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF mulai memprioritaskan pembiayaan hijau sebagai bagian dari strategi mereka dalam mencapai tujuan pembangunan global. Hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran internasional bahwa pendanaan iklim merupakan komponen



utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Fadhil, 2024).

Pada saat yang sama, *blended finance* muncul sebagai pendekatan yang mampu menarik investasi sektor swasta untuk proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Dengan memadukan dana publik dan privat, *blended finance* mengurangi risiko yang dihadapi investor, sehingga memungkinkan dana besar mengalir ke sektor-sektor yang sebelumnya dianggap tidak menarik secara komersial (Hasanah, 2022).

Perkembangan *blended finance* menunjukkan bahwa sektor swasta kini memainkan peran semakin besar dalam pendanaan pembangunan global. Namun, partisipasi swasta ini juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang akuntabilitas dan potensi dominasi kepentingan bisnis dalam kebijakan internasional (Martens, 2022).

Salah satu alasan utama munculnya inovasi pembiayaan ini adalah ketidakpastian dalam pendanaan tradisional. Banyak organisasi internasional bergantung pada dana yang terlalu diarahkan, sehingga mereka tidak memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan mendesak. Krisis WHO pada pandemi COVID-19 menjadi contoh kegagalan struktur pendanaan lama (Moon, 2020).

Perkembangan *green finance* juga dipengaruhi oleh pertumbuhan pesat pasar obligasi hijau. Nilai pasar yang mencapai triliunan dolar membuka peluang baru bagi organisasi internasional untuk memanfaatkan

instrumen pasar modal dalam pembiayaan pembangunan (Climate Bonds Initiative, 2021).

Namun, tanpa standar dan verifikasi yang ketat, pembiayaan hijau berisiko menciptakan praktik *greenwashing*, yaitu klaim keberlanjutan palsu yang merusak kredibilitas dan efektivitas pembiayaan hijau (Flammer, 2021).

Di sisi lain, *blended finance* dihadapkan pada kritik karena struktur risiko dan imbal hasil yang sering kali tidak adil. Investor swasta mendapat perlindungan risiko, sementara lembaga publik dan masyarakat menanggung risiko terbesar. Ketimpangan ini menjadi isu serius dalam tata kelola pembiayaan global (Osei, 2023).

Organisasi masyarakat sipil menilai bahwa *blended finance* sering terlalu berpihak pada investor, sehingga gagal memberikan manfaat optimal bagi komunitas lokal (Oxfam, 2020).

Pada tataran tata kelola global, inovasi pembiayaan memperluas interaksi antara organisasi internasional, negara, dan sektor swasta. Dinamika ini melahirkan model tata kelola baru yang lebih terdistribusi, atau *polycentric governance*, di mana pusat kekuasaan tidak lagi terletak hanya pada negara (Hale, 2021).

Fragmentasi tata kelola ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, organisasi internasional memperoleh lebih banyak sumber pendanaan. Namun di sisi lain, koordinasi semakin sulit karena banyak aktor terlibat dengan kepentingan berbeda-beda (Rahman, 2021).



Legitimasi organisasi internasional terkait erat dengan bagaimana mereka mengelola inovasi pembiayaan ini. Jika pendanaan baru dipandang meningkatkan responsivitas dan efektivitas lembaga, legitimasi meningkat. Namun jika pembiayaan baru dianggap memperburuk ketimpangan kekuasaan, legitimasi akan menurun (Patel, 2020).

Dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), inovasi pembiayaan menjadi komponen utama yang menentukan keberhasilan agenda global tersebut. Target SDGs membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar dibanding kapasitas fiskal negara dan lembaga internasional saat ini (Chen, 2023).

Namun, negara berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan skema pembiayaan baru ini. Rendahnya kapasitas teknis dan kelembagaan menjadi hambatan serius dalam mengakses dana pembiayaan hijau dan *blended finance* (Amri, 2022).

Organisasi internasional berperan penting dalam mendukung negara berkembang melalui pelatihan, bantuan teknis, dan transfer kapasitas. Program-program ini bertujuan memastikan bahwa inovasi pembiayaan tidak hanya menguntungkan negara maju dan investor global.

Namun, keberhasilan inovasi pembiayaan sangat bergantung pada tata kelola risiko. Ketidakstabilan pasar global dapat berdampak langsung pada keberlanjutan proyek pembangunan. Oleh karena itu, risiko harus dikelola dengan pendekatan komprehensif (Griffith-Jones & Tyson, 2020).

Gejolak geopolitik, pandemi, dan krisis iklim semakin menegaskan perlunya sistem pendanaan organisasi internasional yang adaptif. Sumber-sumber pendanaan baru harus mampu menjaga stabilitas fiskal lembaga dalam menghadapi kondisi ekstrem (Lagomarsino, 2021).

Kemampuan organisasi internasional beradaptasi dengan inovasi pembiayaan juga menunjukkan kapasitas kelembagaan mereka. Lembaga yang lamban beradaptasi cenderung kehilangan pengaruh di panggung global (Okoro, 2022).

Transparansi menjadi syarat penting bagi keberhasilan inovasi pembiayaan. Tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, mekanisme pembiayaan baru dapat menjadi ruang bagi penyalahgunaan, mengingat kompleksitas struktur pendanaan yang melibatkan banyak aktor (Transparency International, 2020).

Selain itu, masuknya aktor non-negara seperti korporasi global dan filantropi ke dalam arsitektur pembiayaan internasional telah mengubah keseimbangan kekuasaan dalam tata kelola global. Fenomena ini sering disebut sebagai privatisasi multilateral (Ibrahim, 2023).

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mengatur arah pembangunan global: organisasi internasional, negara anggota, atau investor swasta? Pertanyaan ini menjadi inti perdebatan mengenai masa depan tata kelola global.

Pada akhirnya, inovasi pembiayaan tidak hanya mengenai sumber dana, tetapi tentang



transformasi sistemik dalam cara organisasi internasional menjalankan mandatnya. *Green finance* dan *blended finance* menawarkan peluang besar, tetapi juga memerlukan kerangka akuntabilitas yang kokoh agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dunia.

Pendahuluan ini menunjukkan bahwa masa depan tata kelola global akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi internasional mengelola inovasi pembiayaan ini secara adil, transparan, dan strategis. Tanpa reformasi pendanaan, organisasi internasional berisiko kehilangan kapasitas untuk memimpin agenda global secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena isu inovasi pembiayaan organisasi internasional merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara aktor publik, privat, serta lembaga multilateral. Pendekatan ini efektif untuk menggali dinamika, proses, dan konteks normatif di balik penerapan *green finance* dan *blended finance*, seperti dianalisis dalam kajian pembiayaan berkelanjutan oleh Liu dan Zhao (2024) serta Ahmad (2025). Pendekatan ini juga memberi ruang untuk memahami implikasi kebijakan terhadap tata kelola global yang berubah cepat (Lee, 2024).

Desain penelitian yang digunakan adalah *library research*. Studi kepustakaan relevan karena data penelitian banyak bersumber pada dokumen resmi organisasi internasional, laporan pendanaan global, serta publikasi akademik tentang inovasi pembiayaan. Penggunaan desain ini sesuai dengan praktik analisis dokumen dalam

penelitian keuangan berkelanjutan modern (Gafsi & Louhichi, 2024).

Sumber data utama mencakup dokumen kebijakan dari organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, OECD, serta lembaga keuangan lainnya yang aktif dalam implementasi *green finance* dan *blended finance*. Dokumen-dokumen tersebut memuat pedoman operasional, laporan evaluasi, serta kerangka kerja pendanaan global yang relevan (UNDP, 2020).

Selain dokumen resmi, penelitian ini menggunakan artikel jurnal 5 tahun terakhir yang membahas inovasi pembiayaan, risiko tata kelola, dan partisipasi sektor swasta dalam pendanaan pembangunan. Kajian akademik terbaru memberikan pemahaman mutakhir mengenai hubungan antara keuangan berkelanjutan dan legitimasi lembaga internasional (Roberts & Matthews, 2020; Singh, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui *systematic literature review* dengan kriteria seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan periode publikasi 2019–2024. Pendekatan ini penting untuk memastikan literatur yang dianalisis mencerminkan perkembangan terbaru dalam mekanisme pembiayaan global (Patel, 2020). Teknik ini meminimalkan bias dalam seleksi dokumen.

Seluruh sumber kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, konsep, kategori, dan hubungan tematik. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian keuangan berkelanjutan dan governance (Huang, 2024). Analisis isi memungkinkan peneliti menafsirkan bagaimana *green finance* dan *blended finance* dipresentasikan dalam dokumen akademik maupun kebijakan.



Penelitian ini juga menerapkan *thematic analysis* untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema besar seperti fleksibilitas pendanaan, partisipasi sektor privat, potensi risiko, dan implikasi tata kelola. Teknik ini selaras dengan analisis tematik yang banyak dipakai dalam riset keberlanjutan (Meyer, 2024).

Untuk meningkatkan validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen kebijakan, laporan evaluasi, dan publikasi akademik terbaru. Triangulasi penting mengingat data keuangan global sering dipengaruhi oleh dinamika politik dan arah kebijakan negara donor (Okoro, 2022).

Refleksivitas juga diterapkan untuk menjaga objektivitas peneliti. Hal ini dilakukan dengan menyadari potensi bias interpretasi terhadap dokumen dan memastikan bahwa analisis didasarkan pada sumber empiris dan teori yang kuat (Park, 2023).

Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai implementasi *green finance* dan *blended finance* antar berbagai organisasi internasional. Metode ini membantu memperjelas perbedaan desain kelembagaan dan efektivitas skema pembiayaan dalam konteks global (Ekawati, 2023).

Selain itu, perspektif *global governance analysis* digunakan untuk menilai bagaimana mekanisme pendanaan baru ini memengaruhi distribusi kekuasaan, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi internasional. Analisis ini merujuk pada perkembangan governance yang menekankan peran multi-aktor dalam pendanaan global (Gupta, 2022).

Penelitian ini menghadapi kendala akses pada beberapa dokumen internal organisasi internasional yang tidak dipublikasikan, terutama laporan teknis mengenai proyek *blended finance*. Namun,

data publik yang tersedia tetap cukup untuk membangun analisis kuat (Benson & Salim, 2023).

Keterbatasan lain adalah tidak seragamnya data antarorganisasi internasional. Banyak lembaga menerbitkan laporan dengan tingkat detail berbeda, sehingga peneliti harus mengintegrasikan informasi dari berbagai platform (Lee, 2024).

Walaupun demikian, metode penelitian ini tetap memberikan kerangka analitis yang solid untuk memahami bagaimana inovasi pembiayaan membentuk kapasitas dan arah kebijakan organisasi internasional. Penggabungan *library research*, *content analysis*, *thematic analysis*, dan triangulasi menghasilkan temuan yang komprehensif dan kredibel (Gafsi & Louhichi, 2024).

Secara keseluruhan, pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti memahami dinamika konseptual, politik, dan teknis yang membentuk transformasi pembiayaan global melalui *green finance* dan *blended finance*. Hal ini memberikan dasar kuat untuk menilai dampaknya terhadap masa depan tata kelola global (Lee, 2024).

PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini berangkat dari semakin melemahnya kapasitas pendanaan organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global yang meningkat pesat. Selama beberapa dekade, organisasi internasional mengandalkan dua sumber utama pendanaan, yaitu kontribusi wajib dan kontribusi sukarela dari negara anggota. Namun, dalam praktiknya kedua mekanisme tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keuangan yang dibutuhkan untuk menghadapi isu-isu besar seperti perubahan iklim, krisis



kesehatan global, peningkatan kemiskinan, konflik bersenjata, serta ketimpangan pembangunan antarnegara. Ketergantungan yang tinggi pada kontribusi negara donor menyebabkan pendanaan menjadi tidak stabil, rentan terhadap dinamika politik, dan sering kali diarahkan pada kepentingan politik donor daripada kebutuhan global yang sebenarnya.

Permasalahan berikutnya muncul dari sifat pendanaan sukarela yang semakin mendominasi struktur anggaran organisasi internasional. Sejumlah lembaga kritis seperti WHO, UNDP, dan organisasi kemanusiaan di bawah PBB menghadapi tekanan besar karena dana yang diterima bersifat *earmarked*, yaitu hanya dapat digunakan sesuai tujuan spesifik yang ditentukan oleh negara donor. Akibatnya, organisasi internasional kehilangan fleksibilitas dalam menentukan strategi dan prioritas program sesuai kondisi lapangan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan banyak program global tidak dapat dijalankan secara optimal, terutama pada kondisi krisis yang memerlukan respons cepat.

Di sisi lain, kebutuhan pendanaan global untuk agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan proyek mitigasi perubahan iklim meningkat jauh lebih cepat daripada ketersediaan sumber dana publik internasional. Gap pendanaan global diperkirakan mencapai triliunan dolar setiap tahun, sesuatu yang tidak mungkin ditutupi hanya dengan mekanisme pendanaan tradisional. Hal ini menimbulkan krisis struktural dalam arsitektur pendanaan organisasi internasional dan mengancam keberlanjutan berbagai program multilateral.

Dalam kondisi seperti ini, *green finance* dan *blended finance* muncul sebagai alternatif mekanisme pembiayaan

yang dianggap mampu mengisi kekosongan pendanaan tersebut. Namun, permasalahan penting yang muncul adalah belum adanya kajian komprehensif mengenai sejauh mana kedua inovasi pembiayaan ini benar-benar efektif memperkuat pendanaan organisasi internasional. Apakah benar *green finance* mampu memobilisasi dana yang signifikan untuk isu perubahan iklim? Apakah benar *blended finance* dapat mendorong partisipasi sektor swasta tanpa mengorbankan kepentingan publik dan keadilan global? Pertanyaan-pertanyaan ini masih membutuhkan analisis akademik yang mendalam.

Selain itu, terdapat pula persoalan terkait risiko tata kelola (*governance risks*). Masuknya sektor swasta dalam pembiayaan multilateral berpotensi menggeser fokus organisasi internasional dari kepentingan publik menuju kepentingan komersial. Kekhawatiran muncul bahwa *blended finance* dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara lembaga internasional dan investor privat, di mana investor menerima keuntungan lebih besar sementara risiko ditanggung oleh negara berkembang dan lembaga publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

Green finance pun tidak terlepas dari potensi masalah. Tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, terdapat risiko terjadinya *greenwashing*, yaitu praktik mengklaim proyek sebagai ramah lingkungan padahal tidak memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan. Risiko ini dapat merusak kredibilitas organisasi internasional dan menghambat perkembangan pasar pembiayaan hijau itu sendiri.

Permasalahan lainnya adalah ketimpangan kapasitas negara berkembang dalam mengakses skema pembiayaan baru ini. Banyak negara berkembang tidak



memiliki lembaga keuangan, regulasi, atau kapasitas teknis yang memadai untuk memenuhi persyaratan teknis instrumen pembiayaan inovatif tersebut. Ketimpangan ini dapat memperlebar jurang antara negara maju dan negara berkembang dalam memperoleh manfaat dari inovasi pendanaan global.

Pada tingkat yang lebih makro, permasalahan terbesar yang hendak diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana inovasi pembiayaan dapat memengaruhi masa depan tata kelola global (*global governance*). Dengan semakin kuatnya peran sektor privat dan institusi keuangan internasional, muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang memegang kendali dalam menentukan arah pembangunan global. Apakah inovasi pembiayaan ini menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif dan adaptif, atau justru memperdalam ketimpangan kekuasaan antara aktor global?

Dengan demikian, inti permasalahan penelitian ini mencakup:

1. Ketidacukupan mekanisme pendanaan tradisional organisasi internasional.
2. Ketergantungan berlebihan pada kontribusi sukarela yang membatasi fleksibilitas lembaga internasional.
3. Kesenjangan pendanaan global yang semakin lebar untuk isu perubahan iklim dan pembangunan.
4. Efektivitas dan risiko dari *green finance* serta *blended finance* sebagai inovasi pendanaan.
5. Potensi masalah akuntabilitas, transparansi, dan dominasi aktor privat dalam mekanisme pembiayaan global.
6. Ketimpangan kapasitas negara berkembang dalam mengakses instrumen pendanaan baru.

7. Dampak inovasi pembiayaan terhadap legitimasi dan arah masa depan tata kelola global.

Narasi ini menunjukkan bahwa permasalahan penelitian tidak hanya bersifat teknis mengenai sumber dana, tetapi juga menyangkut isu normatif, politik, dan struktural dalam hubungan antara organisasi internasional, negara, dan sektor swasta. Semua ini menjadi fokus analisis dalam penelitian mengenai inovasi pembiayaan organisasi internasional dan implikasinya terhadap masa depan tata kelola global.

PEMBAHASAN

Inovasi pembiayaan organisasi internasional menjadi semakin penting ketika mekanisme pendanaan tradisional tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan global. Banyak organisasi internasional menghadapi krisis keuangan yang bersumber dari ketergantungan berlebihan pada kontribusi wajib dan sukarela negara anggota, yang sering kali tidak stabil, terfragmentasi, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional (Torres & Silva, 2020). Ketidakpastian ini menjadi faktor utama yang mendorong lembaga multilateral mencari model pembiayaan alternatif yang lebih adaptif.

Pendanaan sukarela yang terus meningkat dalam struktur anggaran lembaga internasional menyebabkan semakin sempitnya fleksibilitas kebijakan. Negara donor besar kerap mengarahkan kontribusinya pada proyek tertentu yang sesuai kepentingan politik domestiknya. Hal ini berdampak pada melemahnya independensi organisasi internasional dalam menentukan prioritas global (Lee, 2024). Situasi ini juga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara



negara donor dan negara penerima manfaat.

Dalam konteks inilah *green finance* mulai menempati posisi penting sebagai instrumen pembiayaan yang relevan bagi organisasi internasional. Mekanisme *green finance* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak pembiayaan proyek mitigasi perubahan iklim, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa tanpa pembiayaan hijau, dunia akan kesulitan mencapai target pengurangan emisi dan adaptasi iklim (Ahmad, 2025).

Pertumbuhan pasar obligasi hijau menjadi katalis utama bagi berkembangnya *green finance*. Dengan nilai pasar yang mencapai lebih dari USD 1 triliun, organisasi internasional mulai melihat instrumen ini sebagai sumber pendanaan yang signifikan untuk proyek keberlanjutan (Climate Bonds Initiative, 2021). Instrumen obligasi hijau memungkinkan mobilisasi dana dari pasar modal global dengan biaya relatif rendah.

Namun, pengembangan *green finance* tidak terlepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah risiko *greenwashing*, yaitu praktik memberikan label “hijau” pada proyek yang sebenarnya tidak berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan. Penelitian terbaru memperingatkan bahwa tanpa standar verifikasi yang ketat, *greenwashing* akan mengurangi kredibilitas mekanisme pembiayaan hijau dan merusak kepercayaan global (Flammer, 2021).

Di sisi lain, *blended finance* muncul sebagai inovasi penting lainnya dalam pendanaan global. Model ini menggabungkan dana publik atau donor dengan investasi sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang dianggap berisiko tinggi. Kajian

lembaga internasional menunjukkan *blended finance* efektif menciptakan insentif investasi di wilayah atau sektor yang tidak menarik secara komersial (Toliver 2020).

Blended finance bekerja melalui penyediaan jaminan risiko, subsidi bunga, atau dukungan teknis untuk menarik investor swasta. Namun, mekanisme ini juga memunculkan kritik. Studi terbaru menyoroti bahwa *blended finance* sering kali memberikan perlindungan risiko yang terlalu besar kepada investor privat, sehingga menimbulkan ketimpangan pembagian risiko dan keuntungan (Sabine, 2021).

Kritik lain datang dari organisasi masyarakat sipil yang melihat bahwa *blended finance* berpotensi menyuburkan ketergantungan negara berkembang pada investor swasta dan keputusan lembaga keuangan internasional. Laporan independen menunjukkan bahwa proyek yang dibiayai investor privat kerap mengabaikan aspek sosial dan keadilan distribusi manfaat (Oxfam, 2020).

Kendati demikian, inovasi pembiayaan ini mencerminkan perubahan besar dalam tata kelola global. Beberapa studi menggambarkan fenomena tersebut sebagai *polycentric governance*, di mana aktor non-negara seperti sektor swasta, filantropi, dan institusi finansial global memainkan peran semakin besar dalam arsitektur pendanaan internasional (Hale, 2021).

Perubahan ini membawa konsekuensi strategis bagi legitimasi organisasi internasional. Penelitian mutakhir menyatakan bahwa legitimasi lembaga global bergantung pada persepsi bahwa mereka bertindak adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jika inovasi pembiayaan justru memperkuat dominasi aktor privat, maka



legitimasi organisasi dapat terancam (Garg, 2022).

Mekanisme pendanaan baru juga menuntut perubahan dalam desain tata kelola. Organisasi internasional perlu menerapkan sistem pengawasan, standar akuntabilitas, dan transparansi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa *green finance* dan *blended finance* benar-benar melayani tujuan pembangunan berkelanjutan, bukan kepentingan bisnis semata (Transparency International, 2020).

Penerapan inovasi pendanaan ini juga berdampak pada kapasitas organisasi internasional. Peneliti menunjukkan bahwa organisasi internasional yang mampu beradaptasi dengan perubahan struktur pendanaan akan lebih efektif menjalankan mandatnya, termasuk mengelola aktor baru dan memodernisasi struktur internal (Benson & Salim, 2023).

Namun adaptasi bukan hal mudah. Banyak lembaga internasional masih terjebak pada mekanisme pendanaan konvensional dan belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk mengelola skema *green* dan *blended finance*. Kajian terbaru menekankan bahwa negara berkembang dan organisasi internasional membutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat agar dapat memanfaatkan instrumen finansial baru secara efektif (Ekawati, 2023).

Tantangan lainnya adalah kompleksitas risiko finansial yang meningkat akibat keterlibatan investor privat. Studi terkini memperingatkan bahwa skema pembiayaan inovatif dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi jika dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai (Griffith-Jones & Tyson, 2020). Risiko ini mencakup volatilitas pasar, ketidakpastian geopolitik, dan spekulasi investor.

Selain risiko keuangan, terdapat pula risiko sosial. Proyek pembangunan yang didanai *blended finance* sering berdampak negatif terhadap komunitas lokal seperti penggusuran atau kerusakan lingkungan. Banyak proyek tidak menyediakan mekanisme pengaduan atau kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak (Donelly, 2023).

Pada tataran global, inovasi pembiayaan mempengaruhi relasi kekuasaan antara negara berkembang dan negara maju. Beberapa analisis menunjukkan bahwa negara maju, melalui lembaga keuangan internasional atau investor institusional besar, dapat mempengaruhi prioritas pembangunan di negara berkembang melalui desain proyek *blended finance* (Negri, 2024).

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa seharusnya mengarahkan arah pembangunan global: organisasi internasional, negara anggota, atau aktor privat? Pertanyaan tersebut mencerminkan perubahan struktur kekuasaan dalam sistem global (Gupta, 2022).

Terlepas dari tantangan tersebut, banyak organisasi internasional melihat *green finance* sebagai peluang strategis untuk memperkuat fokus pada keberlanjutan. Program-program yang didukung pembiayaan hijau menunjukkan hasil positif dalam peningkatan investasi energi terbarukan maupun penurunan emisi (Meyer, 2024). Namun, hasil ini tidak merata.

Pada sisi lain, *blended finance* menunjukkan kemampuan menarik dana dalam jumlah besar dari sektor privat sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai oleh lembaga pembangunan internasional (Verhoeven, 2021). Fleksibilitas mekanisme ini membuatnya cocok untuk proyek



infrastruktur, energi bersih, dan digitalisasi.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan inovasi pembiayaan ini sangat bergantung pada kapasitas organisasi internasional dalam membentuk kerangka kerja yang adil dan transparan. Tanpa standar pengawasan yang memadai, skema pembiayaan dapat menciptakan ruang korupsi dan penyalahgunaan dana (Transparency International, 2020).

Selain itu, organisasi internasional harus mempertimbangkan dampak jangka panjang inovasi ini terhadap struktur tata kelola global. Penelitian terbaru memperingatkan bahwa meningkatnya peran sektor privat dapat melemahkan pengaruh negara berkembang dalam forum internasional (Park, 2023).

Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk agenda perubahan iklim dan pembangunan sangat besar sehingga organisasi internasional tidak memiliki pilihan selain mengandalkan inovasi pembiayaan. Namun, inovasi ini harus dirancang untuk memperkuat solidaritas global, bukan memperluas kesenjangan (Gafsi & Louhichi, 2024).

Ketidakseimbangan kapasitas negara berkembang dalam mengakses pembiayaan inovatif menjadi masalah kritis. Banyak negara tidak memiliki perangkat kebijakan atau lembaga keuangan domestik yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembiayaan hijau (Ekawati, 2023).

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, organisasi internasional perlu memperluas program dukungan teknis dan pembangunan kapasitas yang membantu negara berkembang mengadopsi instrumen baru. Bank Dunia dan OECD telah memulai inisiatif ini, meski hasilnya masih beragam (UNDP, 2020).

Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi harus diperkuat agar organisasi internasional dapat menilai secara berkala efektivitas *green finance* dan *blended finance*. Evaluasi jangka panjang diperlukan untuk mencegah pemborosan dana dan memastikan hasil berkelanjutan (Huang, 2024).

Sebagai aktor global, organisasi internasional juga bertanggung jawab membangun standar global yang memastikan pembiayaan inovatif benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan. Standarisasi diperlukan agar proyek yang dibiayai benar-benar membawa dampak positif (Meyer, 2024).

Pada titik ini, terlihat bahwa inovasi pembiayaan bukan sekadar solusi finansial, tetapi transformasi mendalam yang memengaruhi tata kelola global, peran aktor internasional, dan arah pembangunan jangka panjang dunia. Oleh karena itu, organisasi internasional harus berhati-hati dalam mengelola dinamika baru ini.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa *green finance* dan *blended finance* merupakan inovasi penting yang membantu menjawab krisis pendanaan global, tetapi sekaligus membuka tantangan baru terkait tata kelola, akuntabilitas, dan distribusi kekuasaan internasional. Transformasi ini akan menentukan masa depan efektivitas dan legitimasi organisasi internasional.

Dengan demikian, masa depan tata kelola global sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi internasional mendesain, mengimplementasikan, dan mengawasi inovasi pembiayaan ini. Inovasi pendanaan dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sistem global, tetapi hanya jika dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik global.



PENUTUP

Kesimpulan

Inovasi pembiayaan melalui *green finance* dan *blended finance* telah menjadi respons strategis organisasi internasional terhadap ketidakcukupan mekanisme pendanaan tradisional. Ketergantungan pada kontribusi wajib dan sukarela terbukti tidak stabil dan sangat dipengaruhi kepentingan politik donor, sehingga membatasi fleksibilitas organisasi dalam menjalankan mandat global. Inovasi pembiayaan memungkinkan perluasan sumber dana dan peningkatan keterlibatan aktor non-negara dalam pembangunan internasional. *Green finance* membuka peluang besar bagi pembiayaan agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan *blended finance* memperkuat kolaborasi publik–swasta untuk proyek berisiko tinggi di negara berkembang. Meski berkontribusi mengatasi kesenjangan pendanaan, kedua mekanisme ini membawa risiko tata kelola seperti *greenwashing*, ketimpangan pembagian risiko, dan dominasi kepentingan investor privat. Tanpa kerangka akuntabilitas dan transparansi yang kuat, inovasi pembiayaan berpotensi memperburuk ketidakadilan global. Karena itu, inovasi pembiayaan bukan sekadar isu finansial, tetapi perubahan struktural yang memengaruhi legitimasi organisasi internasional. Keberhasilan implementasinya bergantung pada pemerataan akses dan tata kelola yang memastikan dukungan nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, terdapat beberapa saran yang relevan untuk meningkatkan efektivitas implementasi *green finance* dan *blended finance* dalam organisasi internasional. Pertama, organisasi internasional perlu

memperkuat standar verifikasi, pelabelan, dan pengawasan terhadap proyek pembiayaan hijau untuk mencegah terjadinya *greenwashing*. Standar global yang konsisten akan meningkatkan kredibilitas pasar pembiayaan hijau dan mengamankan dampak keberlanjutan yang nyata. Kedua, mekanisme *blended finance* harus didesain ulang agar lebih adil, terutama dalam pembagian risiko dan manfaat antara sektor publik dan privat. Organisasi internasional dan lembaga keuangan harus memastikan bahwa kontribusi publik tidak secara berlebihan melindungi investor privat dan bahwa masyarakat lokal memperoleh manfaat yang sepadan dari proyek pembangunan. Ketiga, peningkatan kapasitas negara berkembang merupakan prioritas utama. Organisasi internasional perlu memperluas program pelatihan, dukungan teknis, dan asistensi kelembagaan untuk membantu negara berkembang mengakses instrumen pembiayaan inovatif, sekaligus memperkuat kapasitas regulasi dan manajemen proyek pembangunan berkelanjutan. Keempat, diperlukan transparansi yang lebih kuat dalam struktur tata kelola inovasi pembiayaan. Mekanisme pelaporan publik, audit independen, dan keterlibatan masyarakat sipil harus diperluas untuk memastikan bahwa inovasi pendanaan tidak hanya menguntungkan aktor tertentu, tetapi juga melindungi kepentingan global secara menyeluruh. Kelima, organisasi internasional perlu mengembangkan kerangka kerja internasional yang mengintegrasikan *green finance* dan *blended finance* dengan prinsip keadilan iklim, inklusivitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Kerangka ini dapat menjadi panduan bagi negara anggota dan investor dalam memastikan bahwa inovasi pendanaan selaras dengan tujuan pembangunan global. Akhirnya,



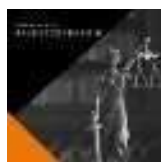
penting bagi organisasi internasional untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan fleksibilitas pendanaan dan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Inovasi pembiayaan hanya akan efektif jika dikelola dengan nilai transparansi, integritas, dan keadilan yang menjamin bahwa transformasi sistem pendanaan benar-benar memperkuat tata kelola global yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2025). *Green finance and its impact on net-zero energy transition. Energy Research Letters, 12*(1), 1–12.
- Alam, M. (2021). Climate-related financial risks and sustainable development planning. *Environmental Economics and Policy Studies, 23*(4), 567–585.
- Amri, F., & Nugraha, R. (2022). Green bonds and renewable energy growth in developing countries. *International Journal of Energy Economics and Policy, 12*(5), 455–463.
- Bagchi, A., & Paul, S. (2022). Challenges in implementing green taxonomy frameworks in developing countries. *Journal of Cleaner Production, 367*, 132–147.
- Banga, J. (2019). The green bond market: A potential source of climate finance for developing countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment, 9*(1), 17–32.
- Benson, K., & Salim, A. (2023). Political economy of green investment flows in the Global South. *World Development Perspectives, 32*, 100–118.
- Chen, L., & Wu, T. (2023). Impact of sustainable financing on global climate mitigation. *Climate Policy, 23*(6), 998–1012.
- Donnelly, E., & Moussa, A. (2023). Accountability challenges in multilateral development finance institutions. *Global Governance, 29*(2), 178–197.
- Dwianto, A., & Putri, S. (2021). Green financing and environmental performance of Indonesian corporations. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25*(3), 401–415.
- Ekawati, D. (2023). The role of development banks in blended finance for infrastructure. *Asian Development Journal, 40*(2), 145–160.
- Fadhil, M. A. (2024). Global green finance and agricultural SMEs: Evidence from Iraq. *AgBioForum, 27*(1), 55–70.
- Fernandes, A. (2022). Global redistributive justice through green finance. *Journal of Environmental Policy & Planning, 24*(2), 216–234.



- Gafsi, N., & Louhichi, L. (2024). The role of *green finance* in sustainable energy transition across MENA countries. *Sustainable Development*, 32(3), 455–468.
- Garg, S., & Shukla, R. (2022). ESG investment trends and implications for sustainable financing mechanisms. *Finance Research Letters*, 45, 102–125.
- Gupta, D. (2022). Private sector financing in global development regimes. *Journal of Global Governance*, 28(1), 89–105.
- Hasanah, N., & Hariyono, S. (2022). Implementasi green financing terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. *Jurnal Ekobis*, 23(2), 112–128.
- Hidayat, S. (2024). Green sukuk as an instrument for sustainable development funding. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 101–118.
- Huang, J. (2024). Risks of greenwashing in global green bond markets. *Finance Research Letters*, 59, 104–118.
- Hughes, L., & Rietig, K. (2022). Green finance governance and political drivers of sustainable investment. *Environmental Politics*, 31(4), 753–774.
- Ibrahim, H., & Yusuf, N. (2023). Evaluating governance risk in *blended finance* projects. *Journal of Public Policy & Governance*, 19(3), 244–260.
- Khan, M., & Kumar, R. (2024). Scaling climate finance in the Global South: Barriers and opportunities. *Environmental Economics and Policy Studies*, 26(2), 321–340.
- Kumar, S. (2021). Growth of climate finance and its implications for global governance. *Journal of International Development*, 33(8), 1467–1483.
- Lazzarini, S. (2020). Public–private interaction in development finance: Rethinking state roles in blended finance. *World Development*, 136, 105–115.
- Lee, C. (2024). Governance reforms in multilateral climate finance institutions. *Journal of International Environmental Agreements*, 24(1), 55–74.
- Liu, M., & Zhao, Y. (2024). *Green finance* as a driver of corporate green innovation in emerging economies. *SAGE Open*, 14(2), 1–15.
- Marzano, E., & Zito, A. (2023). Green transition and multilateral bank financing during global crises. *Global Environmental Politics*, 23(1), 45–68.



- Meyer, J. (2024). Sustainability-linked bonds and emerging market transitions. *Journal of Sustainable Finance*, 15(1), 50–67.
- Negri, A., & Ricci, R. (2024). Private capital mobilization through international climate funds. *Climate Risk Management*, 43, 100–221.
- Okoro, T. (2022). International climate funds and access barriers for developing countries. *Climate & Development*, 14(5), 463–478.
- Osei, K., & Boateng, R. (2023). *Blended finance* for sustainable development: Opportunities and governance challenges. *Journal of Development Finance*, 10(1), 22–39.
- Oxfam. (2020). Transparency challenges in *blended finance* programs. *Oxfam Development Journal*, 44(2), 233–250.
- Park, S. (2023). The rise of philanthropic capital in climate finance. *Third World Quarterly*, 44(7), 1280–1296.
- Patel, R. (2020). Public–private investment through *blended finance*: A systematic review. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 10(4), 289–304.
- Peters, B., & Schneider, S. (2019). The political economy of climate funds and allocation dynamics. *International Environmental Agreements*, 19(3), 425–443.
- Rahman, S., & Idris, A. (2021). The influence of green financing on low-carbon development in Asia. *Asian Journal of Sustainability*, 15(4), 311–326.
- Roberts, J., & Matthews, K. (2020). Financing the SDGs: The rise of *blended finance* mechanisms. *Global Policy*, 11(5), 672–684.
- Rodrigues, P. (2021). Multistakeholder governance in *blended finance*. *Global Governance Review*, 17(4), 303–323.
- Sabine, M., & Konrad, F. (2021). Leveraging private investment through blended finance: Evidence from infrastructure projects. *Development Policy Review*, 39(5), 882–900.
- Shapiro, A., & Medina, J. (2024). Evaluating climate-blended finance effectiveness in low-income economies. *Development Finance Review*, 11(1), 63–82.
- Singh, P. (2022). Multilateral development banks and innovative financing: A comparative study. *International Organizations Review*, 18(2), 134–151.
- Tolliver, C., Keeley, A. R., & Managi, S. (2020). Policy targets and green bond market



development. *Energy Policy*, 140, 111–121.

Torres, M., & Silva, R. (2020). Accountability gaps in international organizations using *blended finance*. *Journal of International Organizations Studies*, 12(3), 211–228.

Verhoeven, M., & Schulz, H. (2021). Philanthro-capitalism and global development: New actors in international financing. *Third World Quarterly*, 42(7), 1491–1508.

Wang, Y. (2023). Corporate ESG scores and access to *green finance*: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 398, 136–145.

Zhang, Y., & Li, X. (2023). Green financial regulation and sustainable investment flows in emerging markets. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 13(4), 652–670.